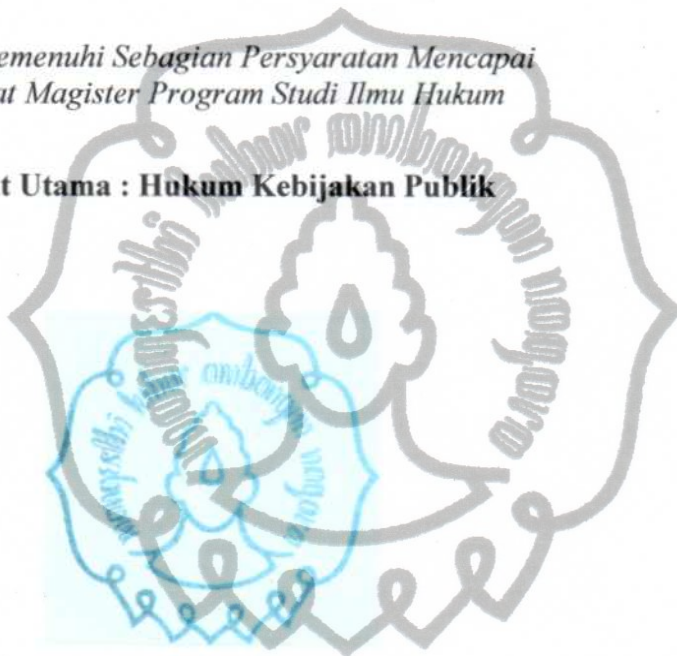


**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA DI  
KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHUWATO BERDASARKAN  
KETENTUAN PASAL 206 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**TESIS**

*Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai  
Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum*

**Minat Utama : Hukum Kebijakan Publik**



**OLEH :**

**YUNUS MOHAMAD  
NIM : S310208236**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2009**

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA DI  
KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHUWATO BERDASARKAN  
KETENTUAN PASAL 206 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Disusun Oleh :

**YUNUS MOHAMAD**  
**NIM : S310208236**

*Telah disetujui Oleh Tim Pembimbing*

Dewan Pembimbing

Jabatan

Nama

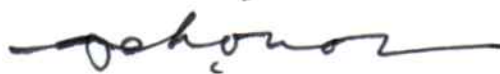
Tanda Tangan

Tanggal

1. Pembimbing I **Dr. I Gusti Ayu KRH.,SH.,MM** .....  
NIP. 19721008 2005021 001
2. Pembimbing II **Prasetyo Hadi Purwandoko,SH.,MS** .....  
NIP. 19600416 198601 1002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Prof. Dr. H. Setiono,S.H.,M.S**  
NIP. 19440505 196902 1 001

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA DI  
KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHUWATO BERDASARKAN  
KETENTUAN PASAL 206 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Disusun Oleh :

**YUNUS MOHAMAD**  
**NIM : S310208236**

*Telah disetujui Oleh Tim Penguji :*

Dewan Pembimbing

Jabatan

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Ketua : Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS.  
NIP. 19440505 1969021 001

Sekretaris : Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH, MHum  
NIP. 19570203 1985032 001

Anggota : 1. Dr. I Gusti Ayu KRH., SH., MM  
NIP. 19721008 2005021 001

2. Prasetyo Hadi Purwandoko, SH., MS.  
NIP. 19600416 198601 1002

Mengtahui,

Ketua Program Studi : Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS.  
Ilmu Hukum NIP. 19440505 1969021 001

Direktur Program : Prof. Drs. Suranto, MSc., Ph.D.  
Pascasarjana NIP. 19570820 1985031 004



**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

NAMA : YUNUS MOHAMMAD

NIM : S 310208236

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul *IMPLEMENTASI Tugas Dan Wewenang Pemerintah Desa Di Kecamatan Paguat kabupaten Pohuwato Berdasarkan Ketentuan Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, adalah banar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka dan catatan kaki. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis ini

Gorontalo, November 2009  
Yang membuat pernyataan.



YUNUS MOHAMMAD



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karna hanya dengan kodrat dan kuasaNya jualah akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : *Implementasi Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa di Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato Berdasarkan Ketentuan Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*

Adapun penulis menyusun tesis ini memiliki beberapa alasan yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar magister pada Program Studi Ilmu Hukum, Minat Utama : Hukum dan Kebijakan Publik. Dan juga untuk mengembangkan wawasan melalui tulisan sehingga dapat dibaca dan dikembangkan oleh tenaga kependidikan dan aparatur pemerintah lainnya. Sangatlah disadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna olehnya itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan dari para pembaca maupun dari pada praktisi yang ada hubungan dengan penulisan ini.

Untuk itu penulis sangatlah layak mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak yang sudah memberi dukungan dan partisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penulisan tesis ini dan lebih lagi ucapan terima kasih penulis yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ. Selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Prof. Drs. Haris Mudjiman, MA. PhD selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta
3. Bapak Prof. Dr. H. Setiono, SH. MH selaku Penguji, Pembimbing dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta
4. Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta
5. Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko, SH., MS selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan petunjuk pada penulis
6. Bapak dan Ibu Dosen / staf pengajar Universitas Sebelas Maret Surakarta yang banyak memberikan wawasan keilmuan kepada penulis
7. Bapak Drs. Rustam Akuba, SH., MH selaku Asisten Pemerintahan Kabupaten Pohuwato yang telah sudi member dukungan kepada saya dalam penelitian ini
8. Semua pihak yang telah membantu terselesainya penulisan tesis ini
9. Rekan-rekan seperjuangan dan seangkatan yang sama-sama mengikuti studi
10. Istri - isteriku serta anak-anakku tercinta yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam menyelesaikan studi

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis yang sederhana ini bisa memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Amin.

Solo, November 2009  
Penulis

**Yunus Mohamad**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat ...elitian .....	6
 BAB II : LANDASAN TEORI .....	 7
A. Tinjauan Tentang Desa.....	7
1. Pengertian Tentang Desa .....	7
2. Pengertian Dusun .....	12
3. Tinjauan Otonomi .....	12
B. Tinjauan Pemerintah Desa.....	18
1. Kepala Desa .....	21
2. Badan Permusyawaratan Desa .....	23
3. Kewenangan Pemerintah Desa .....	24
C. Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Otonomi Desa.....	36
1. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Upaya Penguatan Otonomi Desa .....	36
2. Visi dan Misi dalam penyelenggaraan Otonomi Desa ...	37
3. Tujuan penyelenggaraan Otonomi Desa .....	39
4. Sasaran Penyelenggaraan Otonomi Desa.....	40
5. Program Penguatan Otonomi Desa .....	40
D. Hukum dan Kebijakan Publik.....	41
1. Formulasi Hukum dan Kebijakan Publik .....	42
2. Implementasi Hukum dan Kebijakan Publik .....	42
E. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	44
F. Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat .....	49
G. Kerangka Berfikir.....	50



BAB III : METODE PENELITIAN .....	53
A. Jenis Penelitian .....	53
B. Lokasi Penelitian .....	54
C. Jenis dan Sumber Data .....	55
D. Penentuan Responden .....	56
E. Teknik Pengumpulan Data .....	57
F. Teknik Analisis Data .....	57
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	 59
A. Hasil Penelitian .....	59
1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	59
2. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa ....	62
3. Kendala-kendala yang dihadapi Desa .....	68
B. Pembahasan .....	74
1. Pelaksanaan Tugas Dan wewenang Pemerintah Desa di Kabupaten Pohuwato berdasarkan pasal 206 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004.....	74
2. Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa .....	78
 BAB V : PENUTUP .....	 85
A. Kesimpulan .....	85
B. Implikasi .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	88



## ABSTRAK

**Yunus Mohamad. S310208236. Implementasi Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa Di Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato Berdasarkan Ketentuan Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa Di Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato Berdasarkan Ketentuan Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi aparat pemerintah desa Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian non doktrinal yang bersifat deskriptif kualitatif sebagai makna-makna simbolik para pelaku sosial yang tampak dalam interaksi mereka (hukum yang ada di benak manusia). Penelitian yang mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data tersebut diambil dari berbagai bahan hukum yang berbentuk dokumen, arsip, dan berbagai literatur. Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah desa belum optimal yang ditandai dengan belum adanya suatu produk kebijakan desa yang dihasilkan, anggaran desa belum pernah dibahas bersama-sama dengan BPD serta belum adanya suatu kerjasama antar desa. Kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat pemerintah desa adalah keterbatasan SDM desa, keterbatasan anggaran, minimnya sarana dan prasarana serta rendahnya partisipasi masyarakat.

## ABSTRACT

**Yunus Mohamad. S310208236. An Implementation of task and competency of rural government at Paguat District Pohuwato Regency in accordance with Article 206, Act No. 32/2004 Regarding Local Government.**

This research aims to know the implementation of task and competency of rural government at Paguat District Pohuwato Regency in accordance with article 206, Act No. 32/2004 Regarding Local Government. And also, to know the constraints which is faced in implementing those task and competence.

This research is a non-doctrinal descriptive qualitative as a symbolic meanings of social behavior of their interaction. This research is located in Paguat District Pohuwato Regency. The data of this research is contained of a primary and secondary which were taken from many legal drafts such as, documents, archives, and literatures. The data was collected by doing interviews, observations and library research.

The result of the research indicated that the implementation of the task and competency of rural government at Paguat District Pohuwato Regency was not optimally applied. These could be viewed on, no policies to producing a rural regulation, rural fund had not been discussed with rural consultative assemble (badan Permusyawaratan desa), and no inter rural collaboration with supporting a progression of rural development. In implementing those task and competence, the rural government were faced constrains such as, limited human resources, funds, facilities, and people participations.